**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggung jawabkan pada akhir periode perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra ini ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Pasi lambena yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Berkenaan dengan adanya perubahan sasaran kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021– 2026, maka perlu dilakukan perubahan juga pada dokumen Renstra Perangkat Daerah. Pada Perubahan Renstra ini untuk satu eselon III memegang satu program dan satu eselon IV memegang satu kegiatan sehingga pengukuran kinerja lebih mudah dilakukan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Perubahan Renstra Kecamatan Pasilambena 2021-2026 2 Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasilambena kabupatren Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Pasilambena juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten kepulauan Selayar, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJM Nasional.

**1. 2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Permendagri No. 050- 3889 Tahun 2021, Tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan pembangunan Daerah.
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kaepulauan Selayar No 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembarann daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98
37. **PERBUP** Kab. Kepulauan Selaya**r** No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Kecamatan.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98,
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan.

2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati MKepulauan Selayar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita- cita masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan SelayarMo selama 5 tahun mendatang

* 1. **Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASILAMBENA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

2.3 Kinerja Pelayanan Keca Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar  
**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASILAMBENA**

**BAB IV**

-ISU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

**TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumasan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pasilambena dalam 5 tahun mendatang. Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Pasilambena yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pasilambena dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Visi dan Misi BUpati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

**BAB VII**

**PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup disertai penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah

**BAB II**

**GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN**

**PASILAMBENA**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasilambena mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Pasilambena :

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pernagkat Daerah**

**Fungsi Kecamatan**

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja KecamatanPasilambena Kabupaten MKepulauan Selayar terdiri atas :

1. Camat.

2. Sekretaris

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

5. Seksi tata Pemerintahan

6. Seksi Trantibum

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASILAMBENA**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**C A M A T**

**SEKRETARIS CAMAT**

**KA. SUBAG**

**UMUM, KEPEGAWAIAN, & HUKUM**

**KA. SUBAG**

**PROGRAM DAN KEUANGAN**

**SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

**SEKSI**

**TRANTIBUM**

**D E S A**

**D E S A**

**D E S A**

**SEKSI**

**P M D**

**SEKSI**

**EKBANG**

**SEKSI**

**KESOS**

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Pasilambena juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan

**2.2. Sumber Daya Kecamatan Pasilambena Kepulauan Selayar**

Sumber daya Kecamatan Pasilambena yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

**2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur**

Data PNS Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pend idikan, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data PNS Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Jumlah Pegawai

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **JUMLAH STAFF** | **JUMLAH** | | **PROSENTASE** | |
| **PNS** | **PTT** | **PNS** | **PTT** |
| 1 | CAMAT | 1 |  | 11.11% |  |
| 2 | Sekretaris | 1 |  | 11.11% |  |
| 3 | KEPALA SEKSI | 5 |  | 22.22% |  |
| 4 | KASUBAG | 2 |  | 22.22% |  |
| 5 | Bendahara Pengeluaran | 1 |  | 11.11% |  |
| 6 | Pengelola BMD |  |  |  |  |
| 7 | Staff Administrasi | 4 | 10 | 11.11% | 83.33% |
| 8 | Operator Komputer |  | 2 |  | 16.67% |
| **26** | | 14 | 12 | 100% | 100% |

Tabel 2.2. Data PNS Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **JUMLAH** | | **PROSENTASE** | |
| **PNS** | **CPNS** | **PNS** | **CPNS** |
| **1** | S2 | 1 | 0 | 11,11% | 0 |
| **2** | S1 | 9 | 0 | 33,33 % | 0 |
| **3** | D3 | 1 | 0 | 22,22 % | 0 |
| **4** | SLTA | 3 | 0 | 33,33 % | 0 |
| **5** | STP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | 14 | 0 | 100 % | 0 |

Tabel 2.3. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Gol. Ruang** | **Tingkat Pendidikan Formal (orang)** | | | | | | | | **JML** |
| **S2** | **S1** | **D3** | **D2** | **D1** | **SLTA** | **SLTP** | **SD** |
| 1 | IV/c | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | IV/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | IV/a | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | III/d | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | III/c | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | III/b | -- | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 7 | III/a | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | II/d | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 9 | II/c | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | II/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | II/a | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Jumlah | | 1 | 9 | 1 | - | - | 3 | - | - | 14 |

**2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Pasilambena terdiri dari: - Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Jalan Jendral Sudirman No 03 latokdok.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Barang / Nama Barang** | **Merk/ Type** | **tahun pembeli an** | **Asal usul** | **Keterangan** | |
| **Kondisi** | **Fisik** |
| 1 | Mesin Proses Apung Lain-lain | yanmar | 2014 | Pembelian | RUSAK BERAT | Mesin Kapal 3 Unit.. |
| 2 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | Toyota / Rush S MT F 700 | 2007 | Pembelian |  | Sekretariat Daerah |
| 3 | Sepeda Motor | Yamaha / Vixision | 2013 | Pembelian |  |  |
| 4 | Sepeda Motor | yamaha / Mio | 2013 | Pembelian |  |  |
| 5 | Sepeda Motor | Zusuki / Thunder 125 N | 2007 | Pembelian | RUSAK RINGAN | FISIK ADA |
| 6 | Sepeda Motor | zusuki F1 / SHOGUN 125 | 2007 | Pembelian |  |  |
| 7 | Sepeda Motor | YAMAHA / MIO M3 125 CC | 2015 | Pembelian |  |  |
| 8 | Sepeda Motor | Yamaha / Yamaha New Mio M3 125 | 2016 | Pembelian |  |  |
| 9 | Sepeda Motor | Yamaha / Mio Soul GT AKS SSS | 2018 | Pembelian |  |  |
| 10 | Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain | KAISAR KAISAR / KAISAR TRISEDA | 2015 | Pembelian | RUSAK RINGAN | ALAT ANGKUT RODA 3 |
| 11 | Kapal Motor | kapal Kayu / Kapal motor | 2014 | Pembelian | RUSAK BERAT | Kapal motor angkutan Mahkota Pasilambena |
| 12 | Filling Besi/Metal | Brother / - | 2007 | Pembelian |  |  |
| 13 | Lemari Makan | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 14 | Lemari Kayu | - / - | 2004 | Pembelian |  |  |
| 15 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | - | 2009 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK ADA |
| 16 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | GOLD POSTUREMATIC | 2018 | Pembelian |  |  |
| 17 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | PILLO AMERICAN | 2018 | Pembelian |  |  |
| 18 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 19 | Meja Rapat | - | 2009 | Pembelian |  |  |
| 20 | Meja Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 21 | Meja Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 22 | Meja Makan | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 23 | Meja Makan | - | 2018 | Pembelian |  | Meja Makan dan Kursi Makan |
| 24 | Kursi Rapat | Futura | 2014 | Pembelian |  | Kursi Rapat (1 Paket. ) 30 Buah. |
| 25 | Kursi Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 26 | Kursi Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 27 | Kursi Tamu | - | 2008 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK TIDAK ADA |
| 28 | Kursi Tamu | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 29 | Kursi Biasa | - | 2008 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK TIDAK ADA |
| 30 | Tenda | Tenda Terowongan | 2017 | Pembelian |  | Tenda Terowongan |
| 40 | Sofa | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 31 | Lemari Pakaian | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 32 | MOUBILER LAINNYA | - / - | 2004 | Pembelian |  |  |
| 33 | Alat Pendingin Lain-lain | Sharp | 2011 | Pembelian |  | Kulkas Serbaguna.. |
| 34 | Alat Pendingin Lain-lain | - | 2011 | Pembelian |  | Kulkas Satu Pintu |
| 54 | Televisi | Panasonik | 2008 | Pembelian |  |  |
| 35 | Sound System | BMB Audio Sistem / CS 450 V | 2014 | Pembelian |  | Sound Syistim untuk aula |
| 36 | Lap Top | Sony | 2013 | Pembelian | RUSAK RINGAN | FISIK ADA |
| 37 | Lap Top | Accer | 2014 | Pembelian |  |  |
| 38 | Lap Top | ACCER / LAKTOP ACCER | 2015 | Pembelian |  |  |
| 39 | Lap Top | LENOVO ULTRABOOK YOGA 13 | 2015 | Pembelian |  |  |
| 40 | Lap Top | ACCER | 2016 | Pembelian |  | LAPTOP |
| 41 | Lap Top | Lenovo V330-6WID | 2018 | Pembelian |  |  |
| 42 | Lap Top | Lenovo IP320 | 2018 | Pembelian |  |  |
| 43 | Lap Top | Ip330 Lenovo / Ip330 Lenovo | 2019 | Pembelian |  | CAMAT PASILAMBENA |
| 44 | Lap Top | Ip320 Lenovo / Ip320 Lenovo | 2019 | Pembelian |  | SEKCAM |
| 72 | Printer | Canon IP 2770 / IP 2770 | 2014 | Pembelian |  | Printer Canon |
| 73 | Printer | CANON MP 280 / MP 280 | 2015 | Pembelian |  | PRINTER |
| 74 | Printer | CANON / MP 280 | 2015 | Pembelian |  | PRINTER |
| 45 | Printer | CANON / IP 2770 | 2015 | Pembelian |  | PRINTER |
| 46 | Printer | Hp Deksjet / - | 2007 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK ADA |
| 47 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | - | 2009 | Pembelian |  |  |
| 48 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain | Futura | 2014 | Pembelian |  |  |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Futura / Sandaran Tinggi | 2014 | Pembelian |  |  |
| 50 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | Brother / - | 2007 | Pembelian |  |  |
| 51 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | Brother | 2014 | Pembelian |  | Lemari Arsip 1 Buah |
| 52 | Proyektor + Attachment | Sony / VPL DX102HDMI | 2015 | Pembelian |  | 1. LCD DAN LAYAR SONY  LCD DAN LAYAR ( PROYEKTOR ) |
| 53 | Microphone/Wireless Mic | - | 2009 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK ADA |
| 54 | Microphone/Wireless Mic | VISHIBA / PRO VT-U1009NEW | 2015 | Pembelian |  |  |
| 55 | Professional Sound System | Yamaha | 2012 | Pembelian |  | Keyboard Elekton |
| 56 | Camera Electronic | EOS 1500D / GS1-128 | 2019 | Pembelian |  | CAMAT |
| 57 | Amplifier | DA - 2000 Pro / ICKC 0920 | 2014 | Pembelian |  |  |
| 93 | Sound System | - | 2009 | Pembelian |  |  |
| 58 | Handy Talky | Morgen / MGH.8 | 2017 | Pembelian |  |  |
| 58 | Lemari Arsip | Brother | 2021 | Pembelian |  |  |
| 59 | Genzet |  | 2022 | Pembelian |  |  |
| 60 | Sound system |  | 2021 | Pembelian |  |  |
| 61 | Laptop | Deel | 2021 | Pembelian |  |  |
| 62 | Laptop | Lenovo | 2021 | Pembelian |  |  |
| 63 | TV | LG | 2021 | Pembelian |  |  |

**2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pasilambena berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pasilambena periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pasilambena dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pasilambena ini mengacu pada hasil kerja

**Tabel 2.5. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasilambena Tahun 2016-2021 (TC.23)**

Tabel 2.5. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasilambena Tahun 2016-2021 (TC.23)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD** | **Target NSPK** |  | **Target Indikator lainnya** | **Terget Renstra SKPD Tahun ke-** | | | | | **Realisasi Capaian Tahun ke-** | | | | | **Rasio Capaian Pada tahun ke-** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lemabaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah RW tertib administrasi |  | Jumlah RK yang melaksanakan tertib administrasi |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3:5 | 1:2 | 5:7 | 7:8 | 1:1 |
|  | * Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun ( profil kecamatan dan tipologi) |  | Keberadaan Profil Kecamatan |  | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|  | * Pembinaan Desa ( Desa terbaik) |  | Pembinaan Desa |  | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0::1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
|  | * SOP bidang pemerintahan yang tersusun |  | Keberadaan SOP bidang Pemerintahan |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2 | Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan |  | Keberadaan SOP bidang Administrasi |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|  | * Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun |  | Dokumen Tupoksi, ABK, Anjab |  | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1::1 | 1:1 | 1:1 | 11 |
|  | * Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun |  | Peingkatan Kedisiplinan PNS |  | 90 % | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 80 % | 80 % | 80 % | 85 % | 85 % | 8:9 | 1:1 | 9:8 | 17:19 | 17:19 |
| 3 | Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * % wajib KTP yang memilki KTP |  | Identitas kependudukan |  | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % | 94 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 1:1 | 90:91 | 90:92 | 90:93 | 90:94 |
|  | * Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun |  | Keberadaan SOP bidang Pelayanan |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 4 | Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Terbinanya kader POSYANDU dan PKK |  | Pembinaan kader Posyandu |  | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|  | * % sekolah yang menerapkan UKS |  | Sekolah yang ada UKS |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|  | * Jumlah insiden akibat konflik agama |  | Toleransi antar umat beragama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan |  | Bantuan rumah ibadah |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 5 | Meniingkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan UKM binaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah UKM yang aktif |  | Pembinaan UKM |  | 3 unit | -3 unit | -3 unit | 1 unit | 3 unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 2:3 |
|  | * Jumlah Koperasi aktif |  | Pembinaan Koperasi |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
|  | * SOP bidang EKBANG tersusun |  | Keberadaan SOP Ekbang |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|  | * Jumlah program kemitraan yang terjalin |  | Pembinaan kemitraan UKM |  | 1 prog | 1 prog | 1 prog | 1 prog | 1 prog | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | O:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
| 6 | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dam aman dalam kehidupan bermasyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * % penurunan pelanggaran K3 |  | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan |  | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|  | * % penurunan illegal logging |  | Pencegahan Illegal Loging |  | 80 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|  | * % penurunan illegal fishing |  | Pencegahan Illegal Fishing |  | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
|  | * SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun |  | Keberadaan SOP Trantibun |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1::1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |

Penjelasan:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lemabaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi :
   * + - * Koordinasi dengan aparatur pemerintah desa yanag masih lemah sehingga adinistrasi kependudukan dilakukan oleh aparatur/staff desa
         * Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa yang masih belum dipahami secara mendasar
         * Tingkat pendidikan masyarakat secara umum masih sangat kurang. Orientasi kehidupan sehari-hari hanyalah pada pemenuhan kebutuhan. Seringga tingkat pendididkan, kesehatan dll masih sangat kurang
2. Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja :

• Tingkat keberhasilan tercapai. Hal ini karena koordinasi kepa staff/pegwai yang jumlah kecil sehingga memudahkan pembinaan dan pengawasan.

1. Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat :
   * + - * Kesadaran masyarakat apan pendingnya dokumen kependudukan dan dengan memberikan pelayanan yang baik dan cepat sehingga target capaiannya baik.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat :

* Capaian capatinrget baik, namun ada target yang kecil karena secara realistis seperti dipaparkan sebelumnya, masyarakat secara umum masih berorientasi pada pemenuhan ekonomi sehingga maslah kesehatan seperti keberadaan POSYANDU masih belum menjadi kebutuhan penting.

**Tabel 2.6. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan**

Tabel 2.6. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Pasilambena tahu 2016-2021 (TC.24)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| Belanja Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.     Belanja Tidak Langsung | - | - | - | 3,827,923,915 | 1,668,129,187 | - | - | 3,790,054,742 | 3,763,121,552 | 1,395,928,187 | - | - | - | 98.31% | 83.68% | -129.47% | 90.99% |
| a.     Belanja Pegawai | - | - | - | 3,799,923,915 | 1,105,940,000 | - | - | 3,351,828,844 | 3,735,121,552 | 921,625,500 | - | - | - | 98.29% | 83.33% | -243.59% | 90.81% |
| b.    Belanja Hibah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.     Belanja Langsung | 731,800,000 | 750,000,000 | 1,059,325,000 | 802,875,000 | 643,689,187 | - | - | 960,719,898 | 794,712,539 | 555,803,469 | - | - | 90.69% | 98.98% | 86.35% | -6.26% | 92.01% |
| a.    Belanja Pegawai | - | - | 95,400,000 | 81,600,000 | 81,500,000 | - | - | 95,400,000 | 81,600,000 | 81,500,000 | - | - | 100% | 100% | 100% | -8.52% | 100% |
| b.    Belanja barang dan Jasa | - | - | 533,925,000 | 693,275,000 | 562,189,187 | - | - | 438,225,898 | 685,112,539 | 474,303,469 | - | - | 82.08% | 98.82% | 84.37% | -0.17% | 88.42% |
| c.     Belanja Modal | - | - | 430,000,000 | 28,000,000 | - | - | - | 427,094,000 | 28,000,000 | - | - | - | 99.32% | 100% | - | - | 99.66% |

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 diatas 95 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Pasilambena sudah sangat baik.

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pasilambena**

Analisis terhadap :

* Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan.
* Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
* Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulaluan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032.
* KLHS menggunakan salah satu metode untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (provisioning);

2. Jasa pengaturan (regulating);

3. Jasa budaya (cultural);

4. Jasa pendukung (supporting).

* + - 1. **Tantangan**

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pasilambena dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Terbatasnya Sumberdaya Aparatur

Tuntun pelayanan yang prima kepada masyarakat yang dewasa ini semakin beragam dengan kualitas tuntutan pelayanan yang prima, hal ini harus mendapatkan dukungan personil/staf yang memadai. Keterbatasan sumberdaya di internal Kantor Kecamatan Pasilambena menjadi salah satu kendala yang dari tahun ke tahun harus mendapatkan perhatian tersendiri.

1. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Pulau

Sebagai kecamatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 8 buah pulau, ketersediaan saran transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan apar pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasilambena namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rnagka meningkatnkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasilambena, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Pasilambena.

1. Sistem Pertanian Masyarakarat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekononiam yang berbasis hanya pada pemenuhan kebututhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Pasilambena. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Pasilambena secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengna margin keuntungan yang juga relative kecil.

1. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitasi ketenaga kerjaan yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh ti gkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

1. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan dengan wilayah kepulauan dimana perairan menjadi dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan yang itupun yang ada masih bersifat tradisonal ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas meyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Pasilambena.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan

* + 1. **Peluang**

Sebagaimana pada setiap tantangan maka aka nada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Pasilambena :

1. Peluang pengembangan pembangunan dari Restra K/L, RTRW, KLHS, Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang selayar dengan perencanaan pengembangan di wilayah Kecamatan Pasilambena, khususnya pada sektor kemaritiman dan kerjasama antar wilayah dimana posisi Kecamatan Pasilambena berbatas langsung dengan 2 provinsi.
2. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global. Untuk produk perkebunan, kopra memliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan harga kopra yang berasal dari Pasilambena mendapat harga yang tertinggi di pedagang besar Ibukota Kabupaten. Demikian pula dengan jambu mente.
3. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.
4. Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.
5. Terdapat beberapa pulau dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan pulau kecil yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata, factor kedekatan perairannya dengan Bali dan Lombok dapat dimanfatatkan secara optimal.
6. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.

**BAB III**

**PERRMASALAHAN DAN ISU-SIU STRATEGIS KECAMATAN PASILAMBENA**

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritasprioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya.

Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan Daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

**3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan** **Pasilambena**

Kecamatan Pasilambena yang merupakan kecamatan kepulauan dengan wilayah perairan yang cukup luas dimana terdapat 2 desa yang terletak di 2 pulau yang terpisah dengan kondisi perairan yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, dimana hal ini menjadi kendala yang cukup berarti ditambah dengan kendala telekomunikasi yang tidak tercakup sinyal GSM. Pemerintah Kecamatan Pasilambena menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secapara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

abel 3.1 Permasalahan pelayanan (TB.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| **-1** | -2 | -3 | **-4** |
| **1** | Masih lemahnya koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah | Kebijakan dan arah pembangunan Pemernintah Daerah yang belum tersampaikan dengan baik dan belum dipahami secara mendasar | Desa tidak bertanggung-jawab secara langsung ke Camat |
| Belum maksilmal koordinasi dalam bentuk rapat yang membahas arah kebijakan pembangunan daerah. |
| Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal | Lemahnya integritas dan  profesionalitas aparatur |
| Kurangnya koordinasi,  integrasi dan sinkronisasi  dalam melaksanakan tugas  dan fungsinya |
| Keterbatasan kewenangan  dan anggaran yang  limpahkan/diberikan |
| **2** | Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan Desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal | keterbatasan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan peningkatan pelayanan masyarakat | Keterbatasan jumlah pegawai utnuk memenuhi rasio pelayanan yang ideal |
| Saran pelayanan yang belum optimal dan cenderung masih masih konvensional sehingga memerlukan waktu pelayanan yanng lebih lama |
| **3** | Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah | Tingkat pendidikan dan ekonomi | Pembangunan yang masih menjadikan masyarakat sebagai obyek (fisik) yang seharusnya perimbangan sebagai subyek (permberdayaan) yang ideal |
| Hasil pebangunann yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun keberdayaan masyarakat untuk meningkatkan tingkat sosial dan ekonomi |
| Optimalisasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dimana - Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan. | Data yang belum sempurna dan terkesan seadanya dan terkesn keperpihakan dalam penyaluran dan pemanfaat bantuan yang disalurkan. |
| Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa |
| Sosialiasi bahwa tidak sepantasnya terus-menerus merima bantuan. |
| Usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama | Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan |
| Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas anggaran kegiatan |
| **4** | Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan | Peran Lembaga Kemasyarakatan yang belum dipandang sebagai suatu institusi pernting | Pembinaan secara berkelanjutan yang masih sangat perlu ditingkatkan |
| Keberadaan lembaga masih berupa serimonial pelengkap hanya saat ada kebentingan sesaat saja |

Tebel 3.2 Identifikasi dan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasilambena

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interperstasi: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan |
|
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lemabaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi |  |  |  |
|  | * Jumlah RW tertib administrasi | < | SDM aparatur desa yang masih kurang dan kurang berkelanjutannya pembinaan | - |
|  | * Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun ( profil kecamatan dan tipologi) | = | Dukungan data profil desa yang terbatas | Update data profil yang sudah tersedia sebelumnya |
|  | * Pembinaan Desa ( Desa terbaik) | < | Orientasi pembangunan desa yang masih harus diselaraskan dengan visi misi pemerintah daerah |  |
|  | * SOP bidang pemerintahan yang tersusun | = |  | Dokumen SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
| 2 | Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja |  |  |  |
|  | * SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan | = |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
|  | * Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun | = |  | Dokumen yang sudah tersedia sebelumnya |
|  | * % PNS yang mendapat hukuman disiplin | = |  | Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif |
|  | * Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun | < |  | Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif |
| 3 | Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat |  |  |  |
|  | * % wajib KTP yang memilki KTP | < | Masyarakat belum sepenuhnya bernaggapan bahwa dokumen kependudukan adalah hal yang sangat penting | Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa |
|  | * Indeks kualitas masyarakat |  |  |  |
|  | * Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun | = |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
| 4 | Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat |  |  |  |
|  | * Terbinanya kader POSYANDU dan PKK | = |  | Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa dan petugas Posyandu |
|  | * % sekolah yang menerapkan UKS | = |  | Menjadi prioritas di sekolah |
|  | * Jumlah insiden akibat konflik agama | = |  | Sosialisasi berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan |
|  | * Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan | = | Ketersediaan pendanaan | Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa |
|  | * SOP lingkup pendidikan yang tersusun |  |  |  |
| 5 | Meniingkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan |  |  |  |
|  | * Jumlah UKM yang aktif | < | Kegiatan pelatihan yang sangat terbatas | Potensi sumber daya alam yang tersedia |
|  | * Jumlah Koperasi aktif | 0 |  |  |
|  | * SOP bidang EKBANG tersusun | = |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
|  | * Jumlah program kemitraan yang terjalin | < | Akses informasi terbatas karena keterbatasan jarak | Dukungan pemerintah desa dalam membangun UKM di desanya |
| 6 | Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle) |  |  |  |
|  | * Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan | 0 | Keterbatasa lahan |  |
|  | * Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang terkelola | 0 | Keterbatasan lahan |  |
|  | * SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun | = |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
| 7 | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dam aman dalam kehidupan bermasyarakat |  |  |  |
|  | * % penurunan pelanggaran K3 | = | Tingkat kesadaran hukum yang masih relatif kurang | Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait |
|  | * % penurunan illegal logging | = | Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah | Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait |
|  | * % penurunan illegal fishing | < | Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah | Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait |
|  | * SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun |  |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi

Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

***“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.***

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepiulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);

2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;

3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :

a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.

b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.

c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.

d Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.

e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

a. Tersedianya lahan untuk kawasan.

b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.

c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.

d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.

e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan

2. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.

b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.

c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.

d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.

e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.

f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.

g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.

b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.

c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.

d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :

a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.

b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.

c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.

d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.

e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

a. Tersedianya lahan untuk kawasan.

b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.

c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.

d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.

e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;

2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;

3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta manjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan

4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutaan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauaan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutaan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

**3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Proinsi Sulawesi Selatan**

3.3.1 Telaah Renstra K/L Kemantrian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatas dengan Provinsi Sulawesi Tenggaran dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun factor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkatkan kualitas administrafi birokratif daerah khususnya Kecamatan Pasilambena.

3.3.2 Telaah Renstra perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulwesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

**3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.**

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulaluan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;

c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana

d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;

e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;

f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan

h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;

i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan

j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.

k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten

l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

(1) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :

a. Mengembangan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,

b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;

c. Menjalin kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.

e. Mengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;

f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.

(2) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :

a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;

b. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;

c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan

d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;

(3) Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :

a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;

b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan

c. Menyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

(4) Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :

a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;

b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;

c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;

d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan

e. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.

(5) Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :

a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;

b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).

(6) Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :

a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;

b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;

c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan

d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

(7) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :

a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);

b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan

c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

(8) Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :

a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;

b. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan

c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.

(9) Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :

a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,

b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan

c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

(10) Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :

a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.

b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.

c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.

(11).Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :

a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;

b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;

c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;

d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;

e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;

f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;

g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;

h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan kaeadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

(12). Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :

a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;

d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

3.4.2 Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KLHS menggunakan salah satu metode untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

- Jasa penyediaan (provisioning);

- Jasa pengaturan (regulating);

- Jasa budaya (cultural);

- Jasa pendukung (supporting).

**.3. 5. Penentuan Isu-Isu Stategis**

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

1. Analisis Lingkungan Internal
2. Kekuatan

* Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
* Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelauatan yang saangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.
* Potensi pengembangan sektor pariwisata yang prosfektif terutama pengembangan pulau-pulau kecil yang salah satunya adalah Pulau Kakabia, Pulau Karumpa Kecil, Pulau Kaju Pangnga’ Besar dan Pulau Kaju Pangnga’ Kecil serta keluasan area terumbu karang yakni Taka lambena yang berada di wilayah Kecamatan Pasilambena.

1. Kelemahan

* Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
* Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
* Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tinggkat kecamatan maupun desa yang berorintasi pada pengambangan potensi kelauatan juga potensi perkebunan dll.
* Masih terbatasnya fasilitas kerja.
* Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
* Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

1. Analisis Lingkungan Eksternal
2. Peluang

* Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.
* Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
* Potensi investasi yang relative besar dan prosfektif terutama di sektor perdagangan (distriusi barang), perikanan dan pariwisata (bahari).
* Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.

1. Tantangan

* Kondisi geografis Kecamatan Pasilambena yang wilyahnya sebagaian besar adalah laut yang terdiri atas beberapa pulau.

Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Pasilambena yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.

* Insfrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai. Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasilambena sudah dilalukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namum daya yang masih terbatas
* Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur kelautan.
* Sistem Pertanian Masyarakarat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem
* Kegiatan perekononiam yang berbasis hanya pada pemenuhan kebututhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Pasilambena. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Pasilambena secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengna margin keuntungan yang juga relative kecil.

Tabel 3.3. Pembobotan isu-isu strategis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kriteria | Bobot |
| 1 | Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman. | 30 |
| 2 | Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global. | 25 |
| 3 | Potensi investasi yang relative besar dan prosfektif terutama di sektor perdagangan (distriusi barang), perikanan dan pariwisata (bahari). | 25 |
| 4 | Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa. | 20 |
|  |  | 100 |

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauaan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasiken dalam Renstra Kecamatan Pasilameban 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :

a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

b) Meningkatnya Nilai SAKIP

c) Sesuainya SAP

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :

a) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

b) Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

a. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :

a) Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial

b) Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan pasilambena tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena.**

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Target Kinerja Sasaran Pada Tahun** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan  (M-1) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 70.5% | 72.7% | 75.2% | 80.2% | 85.2% |
| Meningkatnya Nilai SAKIP | Nilai SAKIP Kecamatan | 60,2 | 65,2 | 70.2 | 75.2 | 80.0 |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan Sesuai Standar Akutansi Pemenitahan | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai |
| **2.** | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M-2) | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa | % Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **3** | Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M-5) | Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial | Indeks Ketahanan Sosial | 0,6950 | 0,7050 | 0,7150 | 0,7200 | O,7200 |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan | Angka Kriminalitas | 9,50 | 8,50 | 8,00 | 7,20 | 6,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tabel 4.1 Perubahan Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Paasilambena** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan/ Sasaran** | **Kondisi Awal 2020** | **Target** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasilambena |  |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasilambena | 0,5064 | 0,6064 | 0,7064 | 0,7164 | 0,7264 | 0,7364 |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa | Persentase peningkatan fungsi lembaga desa yang dikoordinasikan | 60,2 | 62,5 | 72,5 | 77,5 | 80 | 80,5 |
| Meningkatnya kualitas pemerintahan desa | Persentase urusan pemerintahan desa yang difasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Pasilambena |  |  | Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Pasilambena | 65,2 | 70,2 | 72,2 | 74,2 | 76,2 | 80,2 |
| Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat | Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan Pasilambena | n/a | 67,14 | 73,14 | 76,14 | 78,14 | 80,14 |
| Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Pasilambena |  |  | Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan Pasilambena | n/a | 78,77 | 79,55 |  |  |  |
| Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasilambena | Tingkat toleransi di Kecamatan Pasilambena | n/a | 86,98 | 88,14 | 90,14 | 92,14 | 94,14 |
| Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan…. |  |  | Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasilambena | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Meningkatnya Nilai SAKIP | Nilai SAKIP Kecamatan Pasilambena | 65,2 | 72,2 | 74,2 | 76,2 | 78,2 | 80,2 |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kecamatan sesuai SAP | Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | n/a | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasilambena | 72,7 | 74,9 | 75 | 77,2 | 79,4 | 80,6 |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pasilambena adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Pasilambena diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pasilambena menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasilambena.

a. Strategis

Strategi yang akan dilakukan yang terdapat dalam Misi1, 2 dan 5 dalam RPJMD periode 2021-2026 adalah :

1. Menigkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Pencapaian Hasil
3. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku
4. Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa
5. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan
6. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia

b. Kebijakan

Untuk mendukung terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026, adalah :

* 1. Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur
  2. Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur.
  3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari.
  4. Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembagkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari
  5. Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat.
  6. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

|  |  |
| --- | --- |
| VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia |  |
| MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | | 1. Menigkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik. | 1. Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur |
| 1. Meningkatnya Nilai SAKIP | | 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Pencapaian Hasil |
| 1. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | 1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku |
| MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan | | | | |  |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 2 | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1. Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa | | 1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari |
| 1. Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa | 1. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan | | 1. Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembagkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia | | | |  |
| MISI 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | | | |  |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 3 | Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | 1. Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial | 1. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia | 1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat. 2. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan |
| 1. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan |

Kecamatan Pasilambena sebagai perngkat daerah yang mempunyai urusan kewilayahan sebagaimana yang Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah menetapkan nomoeklatur kegiatan dan subkegiatan. Hal ini secara focus menjadi kekuatan untuk mendukung sepenuhnya untuk dapat mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026 yang tertuang dalam 3 Pilat dan 1 program unggulan Gerbang Sari;

1. Pembangun Disribusi Logistik (PDL).

Keberadaan dermaga pelabuuhan di Kawawu Kecamatan Pasilambena adalah fasilitas mendukung dari terjalinnya distribusi logistic. Sebagaimana telah dicanangkan bahwa Kecamatan Pasilambena termasuk dalam kawasan penyangga distribusi logistik. Hal ini juga menjadi sebuah keuntungan bagi mendistribusian hasil-hasil pertanian dan hasil perikanan dan kelautan.

1. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Kondisi geografis Kecamatan Pasilambena yang merupakan kecamatan kepulauan, dimana terdiri dari pulau-pulau yang mempunyai potensi keindahan tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi insdustri pariwisata. Letak Kecaamatan Pasilambena yang berbatasan dengan langsung dengan 2 provinsi, pun menjadi keuntungan dan potensi yang baik untuk dikembangkan secara serius. Kecamatan Pasilambena pun menjadi kawasan penyangga pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata seperti yagn telah dicanagkan. Rangkaian pulau-pulau kecil yang memiliki keindahan dan nilai tambah tersendiri, sebut saja salah satunya adalah Pulau Kakabia yang dapat dikembangkan emnjadi industry pariwisata ekologi konservasi satwa unggas dan konserasi kelautan.

1. Pembangunan Kawaasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Sebagai Kecamatan Kepulauan sudah tentu potensi perikanan mempunya potensi yang sangat besar. Bisa disebut bahwa wilayah kelautan Kecamatan Pasilambena adalah raksasa perikanan yang masih tidur. Ketika sentuhan pembangunan yang berkelanjutan dan dikelola dengan baik, maka geliat perikanan di wilayah ini akan sangat membantu insdustri perikanan. Sebagai kawasan penyanggah, maka potensi perikanan Kecamatan Pasilambena sangat menanti sentuhan pengelolaan yang serius.

1. Gerakan Membangun Desa Mandiri.

Secara umum semua desa di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah objek program unggulan ini yagn sekaligus menjadi subjek untuk membangun kemandiriannya. Potensi-potensi desa akan semaksimal mungkin dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarkat. Orientasi pemberdayaan dimana program pebangunan diarahkan untuk masyarakat desa sendiri yang mengatur dan membangun kebutuhan sarana dan prasaranyanya.

Gerakang Membangun Desa Mandiri atau disingkat Gerbng Sari ini secara psikologis adalah program yang membangun manusia atau masyarakat atau keberdayaannya dapat menjadi subjek yang menggerakkan diri untuk menuangkan partisipasinya dalam membangun dan mengawal pembangunan di wilayahnya. Hal ini diharapkan agar arah pembangunan masyarakat sendiri yang melaksanakan dan mengawasinya karena yang lebih mengerti kebutuhannya adalah mereka sendiri

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasilambena di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

* 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17. Fasilitasi Kunjungan Tamu
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
20. Pengadaan Mebel
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

UNSUR KEWILAYAHAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksaananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

* + 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   * 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pasilambena. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasilambena. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, bak dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
9. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
10. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

**Tabel T-C.27 Rencana Prorgam,Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasilambena 2021-2026 Kabupaten Kepulauan**

Tabel T-C.27 Rencana Prorgam,Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasilambena 2021-2026

Kabupaten Kepulauan Selayar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | | **Tujuan** | **Sasaran** | **KODE** | **Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)** | | | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan** | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja OPD Penang gung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 1** | | **Tahun 2** | | **Tahun 3** | | **Tahun 4** | | **Tahun 5** | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra** | |
| **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp. (000.000)** |
| 1 | | 2 | 3 |  | 6 | | | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan |  | x.xx.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | Presentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota | 100% | 100 % | 1,402,496,336 | 100% | 1,421,696,511 | 100% | 1,457,281,575 | 100% | 1,492,241,759 | 100% | 1,527,846,648 | 100% | 1,527,846,648 |  |  |
|  | | Meningkatnya Nilai SAKIP | x.xx.01.2.01 |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Dearah |  |  | **14,300,000** |  | **14,300,000** |  | **14,300,000** |  | **14,300,000** |  | **14,300,000** |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.01.01 |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat  Daerah |  | 4 dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.01.02 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil  Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA | 1 dok | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.01.03 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan  Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen  Perubahan RKA | 1 dok | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.01.04 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil  Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA | 1 dok | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
| 2,500,000 | | x.xx.01.2.01.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan  Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen  Perubahan DPA | 1 dok | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok | 2,500,000 | 1 dok |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.01.06 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar  Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil  Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja  dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 lap | 3 lap | 4,300,000 | 3 dok | 4,300,000 | 3 dok | 4,300,000 | 3 dok | 4,300,000 | 3 dok | 4,300,000 | 3 dok | 4,300,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.01.07 |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat  Daerah | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Daerah | x.xx.01.2.02. |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | Jumlah Dokumen n dan Administrasi Keuangan yang disusun |  |  | **1,130,375,000** |  | **1,130,375,000** |  | **1,130,375,000** |  | **1,130,375,000** |  | **1,130,375,000** |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.02.01 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan  Tunjangan ASN | 9 orang/bulan | 9 org/bln | 1,115,000,000 | 9 org/bln | 1,115,000,000 | 9 org/bln | 1,115,000,000 | 9 org/bln | 1,115,000,000 | 9 org/bln | 1,115,000,000 | 9 org/bln | 1,115,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.02.02 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi  Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.02.03 |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi Keuangan | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.02.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan  Akuntansi | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.02.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan  Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 laporan | 1 lap | 6,625,000 | 1 lap | 6,625,000 | 1 lap | 6,625,000 | 1 lap | 6,625,000 | 1 lap | 6,625,000 | 1 lap | 6,625,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.02.06 |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan  Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.02.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/  Triwulanan/ Semesteran dan Laporan  Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan  Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 1 laporan | 1 lap | 8,750,000 | 1 lap | 8,750,000 | 1 lap | 8,750,000 | 1 lap | 8,750,000 | 1 lap | 8,750,000 | 1 lap | 8,750,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.02.08 |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis  Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.03 |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia |  |  | **4,300,000** |  | **4,300,000** |  | **4,300,000** |  | **4,300,000** |  | **4,300,000** |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.03.01 |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.03.02 |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik  Daerah | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.03.03 |  |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik  Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | laporan | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.03.04 |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,  dan Pengendalian Barang Milik Daerah | laporan | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.03.05 |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan  Laporan Barang Milik Daerah pada | 1 laporan | 1 lap | 4,300,000 | 1 lap | 4,300,000 | 1 lap | 4,300,000 | 1 lap | 4,300,000 | 1 lap | 4,300,000 | 1 lap | 4,300,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.03.06 |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.03.07 |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan | x.xx.01.2.05. |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | Jumlah ASN yang Meningkat Kedisiplinan dan Kapasitasnya |  |  | **5,000,000** |  | **5,000,000** |  | **5,000,000** |  | **5,000,000** |  | **5,000,000** |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.05,.01 |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana  Disiplin Pegawai | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.05.02 |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut  Kelengkapan | paket | 9 paket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.05.03 |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.05.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan  Pelaksanaaan Sistem Informasi kepegawaian | dokumen | 1 dok | 5,000,000.0 | 1 dok | 5,000,000.0 | 1 dok | 5,000,000.0 | 1 dok | 5,000,000.0 | 1 dok | 5,000,000.0 | 1 dok | 5,000,000.0 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.05.05 |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.05.06 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | orang | org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.05.07 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | laporan | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.05.08 |  |  | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | orang | org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.05.09 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | orang | org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | x.xx.01.2.05.10 |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi  Peraturan Perundang-Undangan | orang | org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.05.11 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis  Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.06. |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Jumlah Dokumen Administrasi Umum |  |  | **220,709,649** |  | **222,447,858** |  | **224,191,575** |  | **226,120,676** |  | **226,120,676** |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.6.01 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 1 paket | 2,000,000 | 1 paket | 2,000,000 | 1 paket | 2,000,000 | 1 paket | 2,000,000 | 1 paket | 2,000,000 | 1 paket | 2,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan  Kantor yang Disediakan | Paket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.06.03 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang  Disediakan | Paket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.06.04 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang  Disediakan | Paket | 1 paket | 20,609,649 | 1 paket | 21,647,858 | 1 paket | 22,591,575 | 1 paket | 23,020,676 | 1 paket | 23,020,676 | 1 paket | 23,020,676 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan  yang Disediakan | paket | 1 paket | 5,000,000 | 1 paket | 5,000,000 | 1 paket | 5,000,000 | 1 paket | 5,000,000 | 1 paket | 5,000,000 | 1 paket | 5,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.06.06 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan  Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 1 dok | 3,600,000 | 1 dok | 3,600,000 | 1 dok | 3,600,000 | 1 dok | 3,600,000 | 1 dok | 3,600,000 | 1 dok | 3,600,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.06.07 |  |  | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | paket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.06.08 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 1 dok | 20,000,000 | 1 dok | 20,700,000 | 1 dok | 21,500,000 | 1 dok | 23,000,000 | 1 dok | 23,000,000 | 1 dok | 23,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | laporan | 1 lap | 169,500,000 | 1 dok | 169,500,000 | 1 dok | 169,500,000 | 1 dok | 169,500,000 | 1 dok | 169,500,000 | 1 dok | 169,500,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.06.10 |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.06.11 |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Daerah | x.xx.01.2.07. |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | Jumlah Barang Milik Dearah yang Tersedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.07.01 |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau  Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.07.02 |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau  Lapangan yang Disediakan | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.07.05 |  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.07.06 |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang  Disediakan | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.07.07 |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.07.09 |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan  Lainnya yang Disediakan | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.07.10 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung  Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.07.11 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung  Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.08. |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Tersedia |  |  | **204,500,000** |  | **204,500,000** |  | **204,500,000** |  | **204,500,000** |  | **204,500,000** |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.08.01 |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat  Menyurat | laporan | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.08.02 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan Listrik yang isediakan | laporan | lap | 25,000,000 | 1 dok | 25,000,000 | 1 dok | 25,000,000 | 1 dok | 25,000,000 | 1 dok | 25,000,000 | 1 dok | 25,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.08.03 |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan  Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | 1 lap | 13,500,000 | 1 lap | 13,500,000 | 1 lap | 13,500,000 | 1 lap | 13,500,000 | 1 lap | 13,500,000 | 1 lap | 13,500,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan  Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 1 lap | 166,000,000 | 1 lap | 166,000,000 | 1 lap | 166,000,000 | 1 lap | 166,000,000 | 1 lap | 166,000,000 | 1 lap | 166,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.09. |  | Pe**meliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Jumalah barang Milik daerah yang Dipelihara |  |  | **27,000,000** |  | **27,150,000** |  | **27,301,500** |  | **27,454,000** |  | **27,606,060** |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.09.05 |  |  | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang  Dipelihara | unit | 9 unit | 15,000,000 | 9 unit | 15,150,000 | 9 unit | 15,301,500 | 9 unit | 15,454,515 | 9 unit | 15,609,060 | 9 unit | 15,609,060 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.09.07 |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | unit | 2 unit | 12,000,000 | 2 unit | 12,000,000 | 2 unit | 12,000,000 | 2 unit | 12,000,000 | 2 unit | 12,000,000 | 2 unit | 12,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.09.08 |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | x.xx.01.2.09.10 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | x.xx.01.2.09.11 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung  Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang  Dipelihara/Direhabilitasi | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | x.xx.01.2.09.12 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan  Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | x.xx.01.2.10. |  | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | Jumalah badan Layanan Umum Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | x.xx.01.2.10.01 |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan  Penunjang Pelayanan | Unit kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01 | KECAMATAN | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 30 menit | 30 menit | 19,000,000 | 25 menti | 19,260,110 | 20 menit | 19,742,191 | 20 menit | 20,215,806 | 20 menit | 20,698,155 | 15 menit | 20,698,155 |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.01 |  | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | Jumlah dokumen koordinasi penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.01.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan  dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan  Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | laporan | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.01.02 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas  Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.02. |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | Pemerintahan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah |  |  | **9,000.000** |  | **9.090,000** |  | **9,180,900** |  | **9,272,709** |  | **9,365,436** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.02.01 |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan  Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7.01.02.2.02.02 |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan  Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di  Wilayah Kecamatan | laporan | 1 lap | 9,000,000 | 1 lap | 9,090,000 | 1 lap | 9,180,900 | 1 lap | 9,272,709 | 1 lap | 9,365,436 | 1 lap | 9,365,436 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | |  |  | 7.01.02.2.02.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas  Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di  Wilayah Kecamatan | laporan | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.03. |  | **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** | | Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.03.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan  Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal  yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan  Prasarana Pelayanan Umum | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.03.02 |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan  Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak  Swasta | unit | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.04. |  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | Jumlah pelimpahan urusan pemerintahan kepada camat yang dilaksanakan |  |  | **10,000,000** |  | **10,000,000** |  | **10,000,000** |  | **10,000,000** |  | **10,000,000** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.04.01 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang  Dilaksanakan | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.04.02 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan  pada Urusan Pemerintahan | laporan | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.02.2.04.03 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain  yang Dilimpahkan | laporan | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | Presentase Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%) | 80% | 80% | 41,710,000 | 85% | 42,281,010 | 90% | 43,339,304 | 95% | 44,379,013 | 95% | 45,437,897 | 100% | 45,437,897 |  |  |
|  | |  |  | 7.01.03.2.01. |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan |  |  | **35,000,000** |  | **35,000,000** |  | **35,000,000** |  | **35,000,000** |  | **35,000,000** |  |  |  |  |
|  | | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7.01.03.2.01.01 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang  Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah  Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga kemasyarakatan | 6 lkm | 5,000,000 | 6 lkm | 5,000,000 | 6 lkm | 5,000,000 | 6 lkm | 5,000,000 | 6 lkm | 5,000,000 | 6 lkm | 5,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | 7.01.03.2.01.02 |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja  dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang  Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di  Wilayah Kerja Kecamatan | dokumen | 2 dok | 20,000,000 | 2 dok | 20,000,000 | 2 dok | 20,000,000 | 2 dok | 20,000,000 | 2 dok | 20,000,000 | 2 dok | 20,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | 7.01.03.2.01.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas  Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah  Kecamatan | laporan | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | 1 lap | 10,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | Presentase kasus kriminalitas di tingkat kecamatan (%) |  | 1 | 16,516,000 | 1 | 16,742,104 | 1 | 17,161,159 | 1 | 17,572,855 | 1 | 17,992,143 | 1 | 17,992,143 |  |  |
|  | |  |  | 7.01.04.2.01. |  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum |  | 9,00 | **14,000,000** | **8,50** | **14,000,000** | **8.00** | **14,000,000** | 7.20 | **14,500,000** | 6.20 | 14,500,000 | 6.20 |  |  |  |
|  | | Meningkatkan Pembinaan Sosial Dan Keagamaan | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial | 7.01.04.2.01.01 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan  Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | laporan | 1 lap | 7,000,000 | 1 lap | 7,000,000 | 1 lap | 7,000,000 | 1 lap | 7,500,000 | 1 lap | 7,500,000 | 1 lap | 7,500,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Keagamaan | 7.01.04.2.01.02 |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi  Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | laporan | 1 lap | 7,000,000 | 1 lap | 7,000,000 | 1 lap | 7,000,000 | 1 lap | 7,000,000 | 1 lap | 7,000,000 | 1 lap | 7,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | Presentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%) |  | 0 | 56,000,000 | 0 | 56,766,640 | 0 | 58,187,509 | 0 | 59,583,427 | 0 | 61,005,088 | 0 | 61,005,088 |  |  |
|  | |  |  | 7.01.05.2.01. |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | Jumlah forum koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan |  |  | **49,000,000** |  | **49,450,000** |  | **49,904,500** |  | **50,363,545** |  | **50,827,180** |  |  |  |  |
|  | |  | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial | 7.01.05.2.01.01 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan  Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  dalam rangka Memantapkan Pengamalan  Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta  Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia | orang | 100 org | 40,000,000 | 100 org | 40,400,000 | 100 org | 40,804,000 | 100 org | 41,212,040 | 100 org | 41,624,160 | 100 org | 41,624,160 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | |  |  | 7.01.05.2.01.02 |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,  Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,  Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan  Ketahanan Nasional | orang | org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.05.2.01.03 |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan  Persatuan dan Kesatuan Bangsa | orang | org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktu | 7.01.05.2.01.04 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan  Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | orang | 50 org | 5,000,000 | 50 org | 5,050,000 | 50 org | 5,100,500 | 50 org | 5,151,505 | 50 org | 5,203,020 | 50 org | 5,203,020 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
| alisaikan pada kehidupan sosial ) |
|  | |  |  | 7.01.05.2.01.05 |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai  Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | laporan | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Jumlah Lembaga Masyarakat yang  Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi  berdasarkan Pancasila | Lembaga masyarakat | lm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.05.2.01.07 |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan  yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah  dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.05.2.01.08 |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi  Pimpinan di Kecamatan | dokumen | 1 dok | 4,000,000 | 1 dok | 4,000,000 | 1 dok | 4,000,000 | 1 dok | 4,000,000 | 1 dok | 4,000,000 | 1 dok | 4,000,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.06 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | Persentase Program pemerintahan desa yang |  | 100% | 59,000,000 | 100% | 59,807,710 | 100% | 61,304,697 | 100% | 62,775,397 | 100% | 64,273,218 | 100% | 64,273,218 |  |  |
| mendukung program pemerintah (%) |
|  | |  |  | 7.01.06.2.01 |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | Jumlah fasilitasi,rekom endasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerentahan Desa |  |  | **59,000,000** |  | **59,807,710** |  | **61,304,697** |  | **62,775,397** |  | **64,273,218** |  | **64,273,218** |  |  |
|  | |  |  | 7.01.06.2.01.01 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka  Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan  Kepala Desa | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.02 |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka  Administrasi Tata Pemerintahan Desa | dokumen | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,200,000 | 1 dok | 7,410,000 | 1 dok | 7,620,000 | 1 dok | 7,620,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | 7.01.06.2.01.03 |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan  Aset Desa | dokumen | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,200,000 | 1 dok | 7,410,000 | 1 dok | 7,620,000 | 1 dok | 7,620,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | |  |  | 7.01.06.2.01.04 |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | laporan | lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.06.2.01.05 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat  Desa | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 7.01.06.2.01.06 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.07 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan  Permusyawaratan Desa | dokumen | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,200,000 | 1 dok | 7,410,000 | 1 dok | 7,620,000 | 1 dok | 7,620,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | 7.01.06.2.01.08 |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 7.01.06.2.01.09 |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan  Pembangunan Daerah dengan Pembangunan  Desa | dokumen | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,200,000 | 1 dok | 7,410,000 | 1 dok | 7,620,000 | 1 dok | 7,620,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | 7.01.06.2.01.10 |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan  Kawasan Perdesaan | dokumen | 1 dok | 5,000,000 | 1 dok | 5,000,000 | 1 dok | 5,200,000 | 1 dok | 5,410,000 | 1 dok | 5,410,000 | 1 dok | 5,410,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.11 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka  Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban  Umum | dokumen | 1 dok | 5,000,000 | 1 dok | 5,000,000 | 1 dok | 5,200,000 | 1 dok | 5,410,000 | 1 dok | 5,410,000 | 1 dok | 5,410,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | 7.01.06.2.01.12 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 7.01.06.2.01.13 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka  Perencanaan Pembangunan Partisipatif | dokumen | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,407,710 | 1 dok | 7,904,697 | 1 dok | 8,115,397 | 1 dok | 8,353,218 | 1 dok | 8,353,218 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | 7.01.06.2.01.14 |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja  Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan  Pihak Ketiga | dokumen | dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 7.01.06.2.01.15 |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan  Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | dokumen | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,200,000 | 1 dok | 7,410,000 | 1 dok | 7,620,000 | 1 dok | 7,620,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | | 7.01.06.2.01.16 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan  Masyarakat Desa | dokumen | 1 dok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 7.01.06.2.01.17 |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan  Desa di Wilayahnya | laporan | 1 lap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 7.01.06.2.01.18 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan  Pembangunan Kawasan Perdesaan di WilayahKecamatan | laporan | 1 dok | 7,000,000 | 1 dok | 7,400,000 | 1 dok | 7,600,000 | 1 dok | 7,810,000 | 1 dok | 8,020,000 | 1 dok | 8,020,000 | Kec. Pasilambena | Kec. Pasilambena |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | Sesuai RPJMD | 1,163,468,469.00 | | 1,779,396,352.00 | | 1,742,393,464.00 | | 1,867,690,835.00 | | 1,912,253,938.00 | | 1,912,253,938.00 | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | Total dengan Gaji | 2,565,964,805.00 | | 3,201,092,863.00 | | 3,199,675,039.00 | | 3,359,932,594.00 | | 3,440,100,586.00 | | 3,440,100,586.00 | |  |  |

**BAB VII**

**KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Pasilambena menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Pasilambena dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Pasilambena akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pasilambena dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR.

**TC.28 Indikator Kinerja Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (mengacu pada tujuan dan sasaran renstra)**

TC.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (mengacu pada tujuan dan sasaran renstra)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD** | **Target Kinerja Sasaran Pada Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD** |
| **Tahun 2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 30 Menit | 25 Menit | 20  Menit | 15  Menit | 10  Menit | 8  Menit | 8 Menit |
| 2 | Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan ( % ) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Penurunan Kasus Kriminal daladi Timgkat Kecamatan ( % ) | n/a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Presentase Konflik Sosial dan Keagamaan di Tingkat Kecamatan ( % ) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%) | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Pasilambena. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Pasilambena.

Meskipun rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasilambena, Mei 2023

**Camat Pasilambena**

**ANDI IRWAN,S.Pd, M.M**

Nip. 1982041320060410